

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) memandang hubungan antara manajer dan pemilik dalam kerangka hubungan keagenan. Dalam hubungan keagenan, terjadi kontraktual antara satu pihak, yaitu pemilik (prinsipal), dengan pihak lain, yaitu agen. Dalam kontrak, agen terikat untuk memberikan jasa bagi pemilik. Berdasarkan pendelegasian wewenang pemilik kepada agen, manajemen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. Maka sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan prinsipal, namun teori keagenan juga dapat menimbulkan bahaya moral karena manajer juga dapat bertindak di luar kepentingan perusahaan dimana kepentingan tersebut dapat memaksimalkan kepentingan manajer. Sehingga besar kemungkinan agen tidak selalu bertindak memberikan yang terbaik demi kepentingan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976) yang kemudian bisa menimbulkan *agency problem*. *Agency problem* adalah masalah yang timbul karena konflik kepentingan prinsipal dan agen.

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Einsenhart, 1989 dalam Darmawati, dkk 2004), yaitu : (1) masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan atau tujuan dari *principal* dan *agent* berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi *principal* untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh *agent*;

(2) masalah pembagian risiko yang timbul pada saat *principal* dan agent memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Einsenhart dalam Darmawati, dkk (2004), menyatakan bahwa adanya asumsi yang mengenai sifat dasar manusia :

1. manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
2. manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi manusia mendatang (*bounded rationality*),
3. manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Ketiga sifat tersebut menyebabkan informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan informasi yang disampaikan biasanya diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau lebih dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau *assymetry information* (Ujiyantho & Pramuka, 2007), sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba. Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak *opportunistic*, yaitu memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal pelaporan keuangan, manajer melakukan manajemen laba (*earnings management*) untuk menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Dengan semakin tingginya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan memicu semakin tingginya biaya keagenan (*agency cost*) dan menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba (Richardson dalam Ujiyantho & Pramuka, 2007).

## 2.2 Manajemen Laba

### 2.2.1 Definisi Manajemen Laba

Pada dasarnya manajemen laba memiliki beberapa definisi, antara lain:

Scott (2009; 403) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

*“Earnings management is the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective”.*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa manajemen laba adalah suatu tindakan manajer yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu. Kieso (2011; 145) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

*“Earnings management is often defined as the planned timing of revenues, expenses, gains, and losses to smooth out bumps in earnings”.*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa manajemen laba sering didefinisikan sebagai perencanaan waktu dari pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian untuk meratakan fluktuasi laba. Sedangkan *National Association of Certified Fraud Examiners* mendefinisikan manajemen laba, yaitu:

*“Earnings management is the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accountin data, which is misleading and, when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or judgment or decision.”*

Pernyataan tersebut menyatakan manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk

membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.

Definisi lain menurut Schipper dalam Rahmawati (2012) yaitu:

*“Earnings management is disclosure management in the sense of purposeful intervention in external reporting process, with intent of obtaining some private gain”.*

Pernyataan tersebut mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya yang dilakukan manajer untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi tertentu. Dari definisi tersebut jelas bahwa manajemen laba merupakan intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu.

Secara umum menurut Sulistyanto (2008) manajemen laba dapat didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengetahui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan keinginan manajer, baik untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan.

### **2.2.2 Klasifikasi Manajemen Laba**

Menurut (Wild et al, 2007 dalam Sastradipraja, 2010) manajemen laba diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu :

### 1. *Cosmetic Earnings Management*

*Cosmetic Earnings Management*, terjadi jika manajer memanipulasi akrual yang tidak memiliki konsekuensi *cash flow*. Teknik ini merupakan hasil dari kebebasan dalam aplikasi akuntansi akrual yang mungkin terjadi. Standar akuntansi keuangan dan mekanisme pengawasan mengurangi kebebasan ini tetapi tidak mungkin untuk meniadakan pilihan karena kompleksitas dan keragaman aktivitas usaha. Akuntansi akrual yang membutuhkan estimasi dan pertimbangan (*judgements*) menyebabkan kebebasan manajer dalam menetapkan angka akuntansi. Meskipun kebebasan ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk menyajikan gambaran aktivitas usaha perusahaan yang lebih informatif, kebebasan ini juga memungkinkan mereka mempercantik laporan keuangan (*windowdress financial statement*) dan mengelola laba.

### 2. *Real Earnings Management*

*Real Earnings Management*, terjadi jika manajer melakukan aktivitas dengan konsekuensi *cash flows*. Insentif untuk melakukan *earnings management* mempengaruhi keputusan investasi (*investing*) dan pendanaan (*financing*) oleh manajer. *Real earnings management* lebih bermasalah dibandingkan *cosmetic earnings management* karena mencerminkan keputusan usaha yang seringkali mengurangi kekayaan pemegang saham.

### 2.2.3 Bentuk Manajemen Laba

Scott (2009) menyebutkan bahwa ada empat bentuk manajemen laba, yaitu:

1. *Taking a big bath*. Tindakan ini dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui biaya-biaya pada periode-periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan.
2. Meminimumkan laba (*income minimation*), dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan yang cepat dan sebagainya.
3. Memaksimumkan laba (*income maximization*), yaitu memaksimalkan laba agar memperoleh bonus yang lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati suatu pelanggaran kontrak utang jangka panjang, manajer perusahaan tersebut akan cenderung untuk memaksimalkan laba.
4. Perataan laba (*income smoothing*), merupakan bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara menaikkan dan menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi.

Badruzaman (2010) mengemukakan teknik-teknik untuk melakukan manajemen laba, di antaranya sebagai berikut :

- a. *Earnings Management within Boundary of GAAP*

- a) Perubahan metode penyusutan.
- b) Perubahan masa manfaat aset yang akan disusutkan.
- c) Perubahan estimasi nilai sisa aset yang disusutkan.
- d) Penentuan penyisihan piutang tidak tertagih.
- e) Penentuan penyisihan kewajiban garansi.
- f) Penilaian penyisihan untuk *deferred tax assets*.
- g) Penentuan keberadaan *impaired assets*.
- h) Estimasi tahap penyelesaian *long-term contract*.
- i) Estimasi kemungkinan terjadinya klaim atas kontrak.
- j) Estimasi penurunan nilai investasi.
- k) Estimasi jumlah beban akrual atas restrukturisasi.
- l) Menentukan perlunya penurunan nilai persediaan.
- m) Estimasi beban akrual lingkungan.
- n) Membuat asumsi actuarial untuk *pension plan*.
- o) Menentukan nilai *R & D cost* yang boleh diakui.
- p) Mengubah periode amortisasi *intangible assets*.
- q) Memutuskan kapitalisasi biaya-biaya tertentu.
- r) Menentukan apakah investasi mengakibatkan adanya pengaruh signifikan terhadap *invested*.
- s) Menentukan permanen atau tidaknya suatu penilaian nilai investasi jangka pendek.

b. *Abusive Earnings Management*

- a) Mempercepat pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) yang seharusnya menjadi pendapatan periode berikutnya, atau bahkan mengakui pendapatan fiktif.
- b) Mencatat *understated expenses*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan manajemen untuk melakukan manajemen laba menghasilkan berbagai bentuk manajemen laba, yaitu tindakan kepalang basah (*taking a big bath*), meminimumkan laba (*income minimization*), memaksimalkan laba (*income maximization*), dan perataan laba (*income smoothing*). Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh manajemen dengan cara memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) yaitu memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi laba lebih baik dalam menyusun laporan keuangan maupun dengan cara *abusive earnings management* untuk memperlihatkan kinerja manajemen yang baik dalam menghasilkan laba bagi perusahaan.

#### **2.2.4 Motivasi Manajemen Laba**

Scott (2009) menjelaskan bahwa motivasi manajer perusahaan dalam melakukan manajemen laba adalah :

1. *Bonus purpose* (rencana bonus). Secara lebih spesifik, ini merupakan perluasan hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), yang menyatakan bahwa manajer – manajer perusahaan yang menggunakan rencana bonus akan memaksimalkan pendapatan masa kini atau tahun berjalan mereka. Manajer yang bekerja di perusahaan dengan



rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

2. *Debt covenant* (kontrak utang jangka panjang). Motivasi ini sejalan dengan hipotesis *debt covenant* dalam teori akuntansi positif yaitu semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian utang maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak.
3. *Political motivation* (motivasi politik). Perusahaan-perusahaan besar dan industri strategis cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, khususnya selama periode kemakmuran tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi.
4. *Taxation motivation* (motivasi perpajakan). Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.
5. Pergantian CEO. CEO yang akan habis masa penugasannya atau pensiun akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian pula dengan CEO yang kinerjanya

kurang baik, ia akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.

6. *Initial Public Offering* (penawaran saham perdana). Saat perusahaan *go public*, informasi keuangan yang ada dalam prospektus merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Untuk mempengaruhi keputusan calon investor maka manajer berusaha menaikkan laba yang dilaporkan.

Berdasarkan penjelasan motivasi manajemen laba tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika pada suatu kondisi yang mana pihak manajemen tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan maupun laba yang dihasilkan melebihi dari target laba yang ditentukan, maka manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba, motivasi manajer melakukan manajemen laba dibagi menjadi dua tujuan, yang pertama ditujukan untuk meningkatkan utilitas manajer itu sendiri, yaitu dalam hal memaksimalkan perolehan bonus, yang kedua meningkatkan nilai perusahaan seperti menghindari pelanggaran kontrak, meminimalkan biaya politik, meminimalkan besarnya pajak serta memaksimalkan nilai perusahaan pada saat penawaran saham perdana.

### **2.2.5 Pengukuran Manajemen Laba**

Penelitian yang berkaitan dengan metode deteksi manajemen laba antara lain dilakukan oleh (Dechow et al, 1995) yang mengevaluasi berbagai alternatif model untuk deteksi manajemen laba berdasarkan *accruals*. Perbandingan

dilakukan terhadap lima model adalah sebagai berikut (Dechow et al, 1995 dalam Rahmawati, 2007):

1. Model Healy, pengujian Healy untuk manajemen laba dengan cara membandingkan rata-rata total akrual (dibagi total aktiva periode sebelumnya). Healy (1985) menganggap *non discretionary accruals* (NDA) tidak dapat diobservasi.
2. Model DeAngelo, model DeAngelo (1986) menguji manajemen laba dengan menghitung perbedaan awal dalam total akrual dan dengan asumsi bahwa perbedaan pertama tersebut diharapkan nol, yang berarti tidak ada manajemen laba. Model ini menggunakan total akrual periode terakhir (dibagi total aktiva periode sebelumnya) untuk mengukur *non discretionary accruals*.
3. Model Jones, Jones (1991) mengajukan model yang menolak asumsi bahwa *non discretionary accruals* adalah konstan. Model ini mencoba mengontrol pengaruh perubahan keadaan ekonomi perusahaan pada *non discretionary accruals*.
4. Model *Modified Jones*, model ini dibuat untuk mengeliminasi tendensi konjungtor yang terdapat dalam *The Jones Model*.
5. Model Industri, *Industry Adjusted Model* (Dechow dan Sloan, 1991) mengasumsi bahwa variasi determinan dari *non discretionary accruals* adalah sama dalam jenis industri yang sama. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kemampuan model dengan menerapkan pengujian statistik.

### **2.2.5.1 Discretionary Accruals**

Jones (1991) mengembangkan model manajemen laba dengan membagi total akrual perusahaan menjadi *non discretionary accruals* (tingkat akrual yang wajar) dan *discretionary accruals* (tingkat akrual yang abnormal). *Discretionary accruals* yaitu bentuk kebijakan akrual yang bukan karena kebutuhan dari kondisi perusahaan namun dilakukan oleh manajemen untuk menggeser biaya dan pendapatan dari satu periode ke periode lainnya sehingga tujuan tertentu manajemen dapat terpenuhi. *Discretionary accruals* merupakan suatu cara yang efektif untuk mengurangi pelaporan laba (*earnings*), dimana cara tersebut sulit untuk dideteksi dan digunakan untuk memanipulasi kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan akrual.

Akrual diskresioner merupakan akrual yang berasal dari diskresi manajemen. Tingkat akrual yang abnormal (*discretionary accruals*) inilah yang menjadi perhitungan bagi para peneliti untuk menentukan apakah perusahaan melakukan praktik manajemen laba atau tidak, sedangkan *non discretionary accruals* yaitu kebijakan akrual yang disebabkan oleh tuntutan kondisi perusahaan dan terjadi secara alami seiring dengan perubahan dari aktivitas perusahaan.

### **2.2.5.2 Non Discretionary Accruals**

*Non discretionary accruals* merupakan kebijakan akuntansi yang dipilih perusahaan untuk langsung membebankan (*expense*) atau mengkapitalisasi (*assets*) padahal seharusnya perusahaan belum dapat merealisasikannya, karena *non discretionary accruals* dapat ditolelir, maka *discretionary accruals* akhirnya

dijadikan ukuran mengetahui besarnya manajemen laba yang dilakukan manajemen.

Indikasi adanya manajemen laba dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Deteksi atas kemungkinan dilakukannya manajemen laba dalam laporan keuangan diteliti melalui penggunaan akrual. Konsep akrual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *discretionary accruals* dan *non discretionary accruals*. *Discretionary accruals* adalah komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajemen, artinya manajer memberikan intervensinya dalam proses pelaporan keuangan, sedangkan *non discretionary accruals* adalah komponen akrual di luar kebijakan manajemen atau merupakan pengakuan akrual laba yang wajar yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, oleh karena *non discretionary accruals* merupakan akrual yang wajar dan apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, maka *non discretionary accruals* tidak relevan dalam penelitian ini, oleh karena itu bentuk akrual yang *Ordinary* dalam penelitian ini adalah bentuk *discretionary accruals* yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan pilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi.

Nilai *discretionary accruals* (DA) untuk mengukur tingkat manajemen laba dihitung dengan menggunakan Jones yang dimodifikasi (*Modified Jones Model*) pada (Dechow dkk, 1995). Model ini menggunakan total akrual (TA) yang diklasifikasikan menjadi komponen *discretionary* (DA) dan *non discretionary* (NDA). Menurut (Rahmawati dkk, 2007) *Modified Jones Model* dapat mendeteksi

manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya sejalan dengan hasil penelitian (Dechow dkk, 1995).

Untuk mendapatkan nilai DA maka langkah pertama adalah mencari total akrual (TA) dengan rumus:

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Selanjutnya menghitung *total accrual* (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi *Ordinary Least Squares* (OLS):

$$TA_{it}/A_{i,t-1} = \alpha_1(1/A_{i,t-1}) + \alpha_2(\Delta REV_{it}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{i,t-1})$$

Pada persamaan regresi diatas ( $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ ), NDA dapat dihitung dengan memasukan kembali koefisien-koefisien  $\alpha$ .

$$NDA_{it} = \alpha_1(1/A_{i,t-1}) + \alpha_2((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/A_{i,t-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{i,t-1})$$

Selanjutnya *discretionary accruals* (DA) dapat dihitung sebagai berikut:

Keterangan:

$$DA_{it} = (TA_{it} / A_{i,t-1}) - NDA_{it}$$

$TA_{it}$  : Total

$N_{it}$  : Laba bersih perusahaan (*Net Income*) i pada periode t

- $CFO_{it}$  : Arus kas operasi perusahaan (Operating Cash Flow)  $i$  pada periode  $t$
- $TA_{it}/A_{i,t-1}$  : Total *accruals* pada perusahaan  $i$  pada periode  $t$
- $A_{i,t-1}$  : Total aktiva perusahaan  $i$  pada periode  $t$
- $\Delta REV_{it}$  : Pendapatan (*Revenue*) perusahaan  $i$  pada periode  $t$  dikurangi  
Pendapatan (*Revenue*) perusahaan  $i$  pada periode  $t-1$
- $\Delta REC_{it}$  : Piutang (*Receivable*) perusahaan  $i$  pada periode  $t$  dikurangi  
Piutang (*Receivable*) perusahaan  $i$  pada periode  $t-1$
- $PPE_{it}$  : Nilai aktiva tetap (*gross*) perusahaan  $i$  pada periode  $t$
- $DA_{it}$  : *Discretionary Accruals* perusahaan pada periode  $t$
- $NDA_{it}$  : *Non-Discretionary Accruals* perusahaan pada periode  $t$

### **2.3 International Financial Reporting Standard (IFRS)**

*International Financial Reporting Standards (IFRS)* merupakan standar penyusunan pelaporan keuangan yang didorong untuk dilaksanakan oleh banyak negara di dunia dalam rangka konvergensi menuju terwujudnya penggunaan satu standar yang sama. Efektif pada tahun 2011, IFRS telah diadopsi oleh beberapa negara, seperti Canada, Australia, dan negara-negara Eropa. Bahkan saat ini, negara yang dahulu tidak melakukan konvergensi seperti Amerika Serikat pun diharapkan telah mengadopsi IFRS secepatnya tahun 2014. Penggunaan IFRS ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas akuntansi. IFRS diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)*. Sejak tahun 2005, 16 banyak negara mulai diwajibkan untuk mengadopsi IFRS. Salah satu tujuannya adalah

untuk meningkatkan transparansi dan *comparability* dari pelaporan keuangan di berbagai negara. IASB pada awalnya terbentuk bernama *International Accounting Standards Committee* (IASC). IASC dibentuk di London, Inggris pada tahun 1973 di saat sedang terjadi perubahan mendasar pada peraturan berkaitan dengan akuntansi.

Penting untuk membedakan antara adopsi IFRS atau konvergensi IFRS. Pada level negara, Adopsi berarti standar akuntansi nasional secara langsung digantikan dengan IFRS. Posisi ini diambil oleh negara-negara anggota European Union (EU) yang sejak tahun 2005 memberlakukan IFRS secara penuh. Sedangkan Konvergensi adalah mekanisme bertahap yang dilakukan suatu negara untuk mengganti standar akuntansi nasionalnya dengan IFRS. Perbedaan yang ada biasanya dalam hal waktu penerapan atau sedikit pengecualian dalam pengaturan standar tertentu. Dalam tulisan ini, istilah adopsi dan konvergensi digunakan secara bergantian. Kadangkala istilah adopsi IFRS juga termasuk menunjukkan konvergensi IFRS. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:

1. Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode disajikan.
2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.
3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.



### 2.3.1 Adopsi *International Financial Reporting Standard (IFRS)*

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi lima tingkatan, yaitu:

1. *Full Adoption*, pada tingkatan ini suatu negara mengadopsi seluruh IFRS dan menterjemahkan *word by word*.
2. *Adopted*, mengadopsi seluruh IFRS tetapi disesuaikan dengan kondisi di suatu negara.
3. *Peacemeal*, suatu negara hanya mengadopsi sebagai nomor IFRS, yaitu nomor standar atau paragraf tertentu.
4. *Referenced*, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun oleh badan pembuat standar.
5. *Not adoption at all*, suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

Dengan konvergensi IFRS ini, PSAK akan bersifat *principle-based* atau berdasarkan prinsip, bukan *rule-based* atau berdasarkan aturan lagi seperti selama ini, yang memungkinkan orang untuk menerapkan prosedur akuntansi secara benar sesuai dengan aturan-aturan yang dijabarkan. Sedangkan *principles based* lebih bersifat subjektif dan dapat memicu timbulnya masalah pada pelaporan keuangan. Hal itu memerlukan *professional judgment*, sehingga seiring peningkatan kompetensi harus pula dijalankan bersama dengan peningkatan integritas. Ada peta arah (roadmap) program konvergensi IFRS yang dilakukan melalui tiga tahapan yang direncanakan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI. Pertama tahap adopsi (2008 - 2011) yang meliputi Adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, 18 evaluasi dan kelola

dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Kedua tahap persiapan akhir (2011) yaitu penyelesaian infrastruktur yang diperlukan. Ketiga yaitu tahap implementasi (2012) yaitu penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS dan evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Adopsi penuh IFRS diharapkan memberikan manfaat:

1. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan SAK yang dikenal secara internasional.
2. Meningkatkan arus investasi global.
3. Menurunkan biaya modal melalui pasar modal global dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Strategi adopsi yang dilakukan untuk konvergensi ada dua macam, yaitu: *big bang strategy* dan *gradual strategy*, dengan penjelasan sebagai berikut:

- *Big bang strategy* mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara-negara maju.
- Sedangkan pada *gradual strategy*, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Namun dalam penerapan kedua strategi tersebut harus mempertimbangkan lima hal, guna memperlancar proses adopsi IFRS di Indonesia, yaitu:

1. Konvergensi standar dan proses konvergensi itu sendiri. Hal ini perlu dipertimbangkan karena DSAK belum memutuskan kapan melakukan konvergensi.
2. Ketersediaan dana untuk penterjemah standar.
3. Ketersediaan sumber daya manusia.
4. Ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
5. Sosialisasi standar dan peluang *moral hazard* dalam penyusunan laporan keuangan.

PSAK akan dikonvergensi secara penuh dengan IFRS melalui tiga tahapan, yaitu tahapan adopsi, tahap persiapan akhir, dan tahap implementasi.

Sedangkan arah pengembangan konvergensi IFRS meliputi:

1. PSAK yang sama dengan IFRS akan direvisi, atau akan diterbitkan PSAK yang baru.
2. PSAK yang tidak diatur dalam IFRS, maka akan dikembangkan.
3. PSAK industri khusus dihapuskan.
4. PSAK turunan dari UU tetap dipertahankan.

Tahap adopsi dan tahap persiapan akhir dilakukan pada periode 2008-2011, sedangkan tahap implementasi dilakukan pada periode 2012 dimana pada tahap ini meliputi aktivitas adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur, evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Adapun PSAK konvergensi IFRS yang berlaku efektif 1 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

1. PSAK 10 (2009) Pengaruh perubahan kurs valuta asing

2. PSAK 13 (2011) Properti investasi
3. PSAK 16 (2011) Aset Tetap
4. PSAK 18 (2010) Akuntansi dan pelaporan program manfaat punakarya
5. PSAK 24 (2010) Imbalan kerja
6. PSAK 26 (2011) Biaya Pinjaman
7. PSAK 28 (2010) Akuntansi kontrak asuransi kerugian
8. PSAK 30 (2011) Sewa
9. PSAK 33 (2010) Aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan umum
10. PSAK 34 (2010) Kontrak konstruksi
11. PSAK 36 (2010) Akuntansi kontrak asuransi jiwa
12. PSAK 45 (2010) Pelaporan keuangan organisasi nirlaba
13. PSAK 46 (2010) Pajak penghasilan
14. PSAK 50 (2010) Instrumen keuangan: penyajian
15. PSAK 53 (2011) Pembayaran berbasis saham
16. PSAK 55 (2011) Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran
17. PSAK 56 (2010) Laba perusahaan
18. PSAK 60 Instrumen keuangan
19. PSAK 61 Akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah
20. PSAK 62 Kontrak asuransi
21. PSAK 63 Pelaporan keuangan dalam ekonomi hiper inflasi

22. PSAK 64 Aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral

Sumber: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

### 2.3.2 Dampak Implementasi IFRS

Implementasi IFRS dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam dunia bisnis dan jasa audit di Indonesia. Berikut ini adalah berbagai dampak dalam penerapan IFRS :

1. Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global.
2. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar.
3. Kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif apabila harga-harga fluktuatif.
4. *Smoothing income* menjadi semakin sulit dengan penggunaan *balance sheet approach* dan *fair value*.
5. *Principle-based standards* mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan *professional judgement* ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba (*earning management*).
6. Penggunaan *off balance sheet* semakin terbatas.

Dari beberapa dampak implementasi penggunaan IFRS tersebut, terdapat poin yang menyebutkan bahwa *smoothing income* menjadi semakin sulit untuk dilakukan dengan penggunaan *balance sheet approach* dan *fair value*.

#### 2.4 Ukuran Perusahaan (*Size*)

Menurut Kusumawadhani (2012) ukuran perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks sehingga dimungkinkan melakukan manajemen laba. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan biasanya diukur dengan menggunakan total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan kapitalisasi pasar sebagai proksi dari ukuran perusahaan.

Biro Pusat Statistik mengelompokan tingkatan skala perusahaan berdasarkan tingkatan penjualan adalah sebagai berikut:

Skala Perusahaan	Tingkat Penjualan Setahun
Kecil	< Rp 3 milyar
Sedang	Rp 3 milyar – Rp 10 milyar
Menengah	> Rp 10 milyar

Keputusan ketua Bapepam No. Kep 11/PM/1997 dalam Kusumawardhani (2012) menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus

milyar rupiah, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang memiliki total aktivasnya di atas seratus milyar rupiah.

## **2.5 Financial Leverage (Debt Equity Ratio)**

*Financial leverage* menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Semakin besar utang perusahaan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi investor sehingga investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Akibat kondisi tersebut perusahaan cenderung untuk melakukan praktik perataan laba. Dalam penelitian ini *financial leverage* diprosikan dengan *debt to equity rasio* yang diperoleh melalui total utang dibagi dengan *total equity*.

*Debt Equity Ratio* adalah ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor (Siegel dan Shim, 1999 dalam Fahmi, 2012). Total utang merupakan total kewajiban (baik utang jangka pendek maupun jangka panjang). Sedangkan total ekuitas merupakan total modal sendiri (meliputi total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki oleh perusahaan).

*Debt Equity Ratio* menggambarkan komposisi atau struktur modal perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. Semakin tinggi *Debt Equity Ratio* menunjukkan semakin tinggi komposisi utang perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri sehingga berdampak besar pada beban perusahaan terhadap pihak luar karena akan menurunkan tingkat solvabilitas perusahaan. Penggunaan utang tersebut bagi perusahaan mengandung tiga dimensi, yaitu pemberi kredit akan menitik beratkan pada besarnya jaminan atas

kredit yang diberikan, dengan menggunakan utang maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat, dan dengan menggunakan utang maka pemilik memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan.

## **2.6 Market-to-book Ratios (*Price Book Value*)**

Price to Book Value (PBV) adalah perhitungan atau perbandingan antara *market price* dengan *book value* suatu saham. Dengan rasio PBV ini, investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali *market price* suatu saham dihargai dari *book value* -nya. Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi pergerakan harga suatu saham sehingga dari gambaran tersebut, secara tidak langsung rasio Price Book Value ini juga memberikan pengaruh terhadap harga saham (Fahmi, 2012)

## **2.7 Kepemilikan Institutional (*Equity Holding by Institutional Investors*)**

Kepemilikan intitusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga lain. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memonitori kinerja manajer dalam mengelola perusahaan sehingga dengan adanya kepemilikan oleh institusi lain diharapkan bisa mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer.

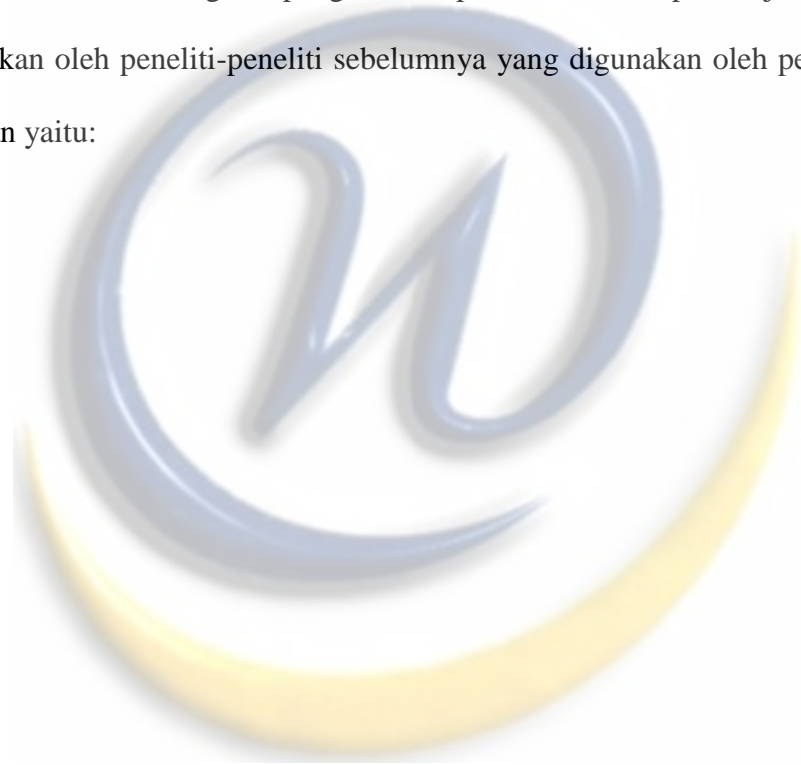
Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. (Cornet et al, 2006 dalam Veronica, 2005) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor



institusional dapat membatasi perilaku manajer. (Moh'd et al, 1998 dalam Veronica, 2005) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang.

## **2.8 Reviu Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai pengaruh adopsi IFRS terhadap manajemen laba telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan yaitu:



**Tabel 2.1**  
**Ikhtisar Beberapa Hasil Penelitian mengenai pengaruh adopsi IFRS terhadap Manajemen Laba**

No	Judul	Peneliti	Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<i>does IFRS influence earnings management? Evidence from India</i>	Rudra dan Bhattacharjee	2012	Var. X: <i>adoption IFRS</i> Var. Y: <i>opportunistic earnings management</i>	adopsi IFRS berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba, namun penelitian lebih lanjut akan dilakukan demi mendapatkan bukti yang lebih kuat.
2.	<i>the effect of financial systems on earnings management among firms reporting under IFRS.</i>	Lin dan Paananen	2006	Var. X: <i>adoption IFRS</i> Var. Y: <i>earnings management</i>	IFRS tidak efektif mengurangi aktivitas manajemen laba secara keseluruhan.
3.	<i>have IFRS affected earnings management in the European Union?</i>	Callao dan Jarne	2010	Var. X: <i>adoption IFRS</i> Var. Y: <i>earnings management</i>	IFRS mendukung diskresioneri akuntansi dan perilaku oportunistik.
4.	pengaruh adopsi IFRS terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia	Santy dkk	2012	Var. X : IFRS Var. Y: manajemen laba	adopsi IFRS tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Sumber : [www.macrothink.org](http://www.macrothink.org), [www.papers.ssrn.com](http://www.papers.ssrn.com), [www.google.co.id](http://www.google.co.id)

## 2.9 Kerangka Pemikiran

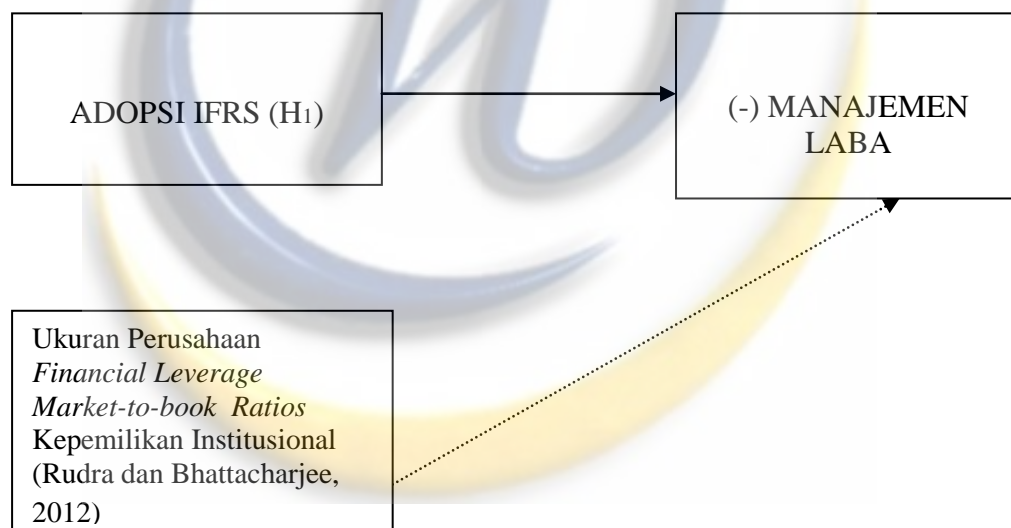
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Setelah kejatuhan

perekonomian Amerika Serikat mulai dari kasus manipulasi Enron hingga kegagalan investasi property di sana yang menyebabkan krisis ekonomi global beberapa tahun lalu, nampaknya kepercayaan dunia akan standar akuntansi Amerika (US. GAAP) ikut memudar. Hal ini dapat dilihat dari pengadopsian standar Internasional (IFRS) yang membudaya baik negara maju maupun berkembang di kawasan Eropa, Asia, Afrika, dan lainnya.

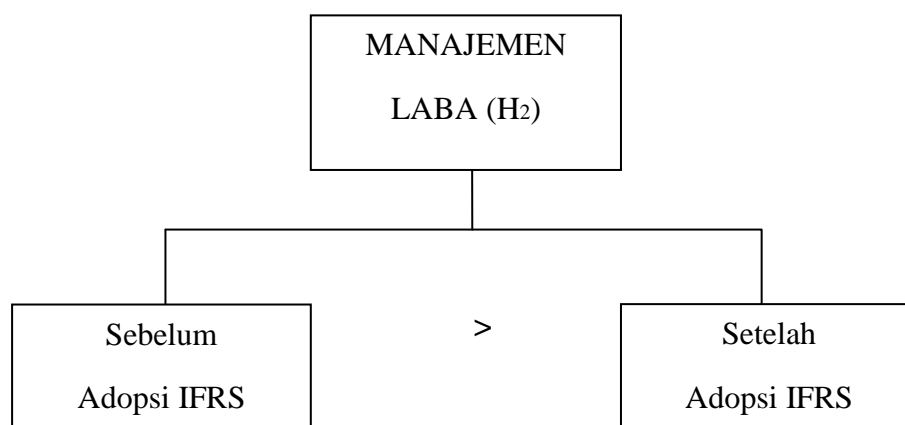
Standar akuntansi internasional bertujuan untuk menyederhanakan berbagai alternatif kebijakan akuntansi yang diperbolehkan dan diharapkan untuk membatasi pertimbangan kebijakan manajemen (*management's discretion*) terhadap manipulasi laba sehingga dapat meningkatkan kualitas laba (Cai dkk, 2008). Terbatasnya pertimbangan kebijakan manajemen tersebut terkait dengan semakin sedikitnya pilihan-pilihan metode akuntansi yang dapat diterapkan sehingga akan meminimalisir praktik kecurangan akuntansi. Sebelum penerapan IFRS, manajemen mempunyai fleksibilitas ketika memilih metode akuntansi sehingga memotivasi manajer untuk memilih metode akuntansi atau untuk mengubah yang digunakan dalam rangka meningkatkan, menurunkan, atau meratakan laba. Dengan kata lain, manajemen dapat dengan mudah memanfaatkan kelonggaran penggunaan metode atau prosedur akuntansi untuk memainkan laba sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen laba. Adanya penerapan IFRS pada perusahaan akan menurunkan tindakan manajemen laba karena terdapat pembatasan pertimbangan kebijakan manajemen dalam hal ini adalah kebijakan dalam pemilihan metode akuntansi yang semakin sedikit akibat adanya penerapan IFRS (Cai dkk, 2008).

Pendekatan *principled based* yang diusung oleh Standar IFRS dipercaya dapat lebih meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan dengan cara mempersempit celah manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba. Faktor-faktor lain seperti ukuran perusahaan, *financial leverage*, *market to book ratio* dan *equity holding by institutional investor* juga perlu diperhatikan dalam meneliti manajemen laba tersebut (Rudra dan Bhattacharjee, 2012). Model kerangka pemikiran teoritis mengenai penelitian yang akan dilakukan dijelaskan dalam gambar 2.1 berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**  
**Model 1**



**Model 2**



## 2.10 Hipotesis Penelitian

### 2.10.1 Pengaruh Adopsi IFRS terhadap Manajemen Laba

Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2006). Suatu hipotesis diterima apabila telah melalui analisis data empiris yang menunjukkan bahwa hipotesis tersebut benar dan begitu pula sebaliknya suatu hipotesis akan ditolak apabila analisis data empiris menunjukkan bahwa hipotesis tersebut salah.

Cai (2008) mengungkapkan salah satu isu dari IASB adalah bahwa standar internasional bertujuan untuk menyederhanakan berbagai alternatif kebijakan akuntansi yang diperbolehkan dan diharapkan untuk membatasi pertimbangan kebijakan manajemen (*management's discretion*) terhadap manipulasi laba sehingga dapat meningkatkan kualitas laba.

Masih menjadi pertanyaan apakah adopsi IFRS akan mempengaruhi kualitas informasi akuntansi dengan cara mengurangi tingkat manajemen laba. Pengadopsian IFRS merupakan bentuk penggunaan bahasa global dalam laporan keuangan perusahaan yang akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kemungkinan akan menurunkan manajemen laba. Asumsi dalam penelitian ini adalah apakah perusahaan di Indonesia yang mengadopsi IFRS mengalami penurunan tingkat manajemen laba, sehingga mempunyai laporan laba yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi IFRS. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Adopsi IFRS berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

## 2.10.2 Perbedaan Tingkat Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah

### Penerapan Adopsi IFRS Secara Penuh

Pengadopsian IFRS yang menganut *principle based* diharapkan dapat menurunkan tingkat manajemen laba. Dalam penelitian Rudra dan Bhattacharjee (2012) mengenai apakah adopsi IFRS mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan di India mendapatkan hasil bahwa adopsi IFRS berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba. Adopsi IFRS dalam penelitian sebelumnya menghasilkan 2 arah, yaitu dapat meningkatkan dan menurunkan manajemen laba. Namun, mengacu pada pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009 yang menyebutkan bahwa IFRS dapat mempersulit tindakan manajemen laba melalui penerapan *fair value* dan *balance sheet approach*. Asumsi penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat manajemen laba pada perusahaan sebelum dan sesudah IFRS, di mana perusahaan yang mengadopsi IFRS cenderung memiliki tingkat manajemen laba yang lebih kecil. Maka dari pemaparan teori di atas, penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap manajemen laba antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS, di mana perusahaan setelah mengadopsi IFRS cenderung memiliki tingkat manajemen laba yang lebih rendah daripada sebelum mengadopsi.